P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

BACKGROUND MAHASISWA, *SMART CITY CONCEPT* DIMODERASI DENGAN TRANSPARANSI ANGGARAN PEMERINTAH DKI JAKARTA

Hurian Kamela[1], Darlin Aulia[2]
[1] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka
[2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom
Email: hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id [1], darlinaulia@telkomuniversity.ac.id [2]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana latar belakang mahasiswa mempengaruhi pemahaman terhadap konsep *Smart City*, khususnya dalam kaitannya dengan anggaran. Di era digital, *Smart City* menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Namun, pemahaman mahasiswa dapat bervariasi berdasarkan disiplin akademik, tingkat pendidikan, serta akses terhadap informasi kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu di wilayah DKI Jakarta, dan dianalisis menggunakan teknik regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap pemahaman *Smart City*; mahasiswa dari bidang teknologi dan kebijakan publik memiliki pemahaman lebih baik dibandingkan dengan disiplin lainnya. Selain itu, transparansi anggaran berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Mahasiswa yang memperoleh akses lebih luas terhadap informasi anggaran menunjukkan pemahaman lebih tinggi dalam penerapan *Smart City*. Hasil ini menegaskan pentingnya transparansi anggaran dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan kota cerdas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Smart City,* latar belakang, transparansi, DKI Jakarta.

Abstract

This study examines how students' backgrounds influence their understanding of the Smart City concept, particularly in relation to budgeting. In the digital era, Smart City initiatives are increasingly important for enhancing public service efficiency. However, students' comprehension may vary depending on their educational background, academic discipline, and access to information on government policies. Using a quantitative survey method, data were collected through questionnaires distributed to students from various disciplines in DKI Jakarta. The data were analysed using moderation regression techniques. The results indicate that students' backgrounds significantly affect their understanding of Smart City; those from technology and public policy fields demonstrate better comprehension than those from other disciplines. Furthermore, budget transparency is identified as a moderating variable that strengthens this relationship. Students with greater access to budget information show higher awareness of how Smart City concepts can be applied. These findings underscore the vital role of budget transparency in enhancing students' understanding of Smart City initiatives and promoting their active participation in developing more intelligent and sustainable cities.
Keywords: *Smart City, background, transparency, DKI Jakarta.*

1. PENDAHULUAN

Era media dan internet saat ini, kemajuan teknologi semakin cepat dan membawa perubahan besar di banyak bidang kehidupan, termasuk cara mengelola kota. *Smart City* adalah konsep yang sedang berkembang untuk mengatasi tantangan urbanisasi. *Smart City* adalah kota yang meningkatkan kualitas hidup warganya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya dan penggunaan sumber daya. Sebagai ibu kota negara Indonesia, pemerintah DKI Jakarta tidak ketinggalan dalam mengembangkan berbagai kebijakan untuk mendukung gagasan *Smart City*, menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan transparansi. Transparansi anggaran mencakup keterbukaan informasi

tentang alokasi dan penggunaan anggaran serta partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai (Putra et al., 2024). Meskipun ada banyak upaya yang dilakukan, pelaksanaan konsep *Smart City* di Jakarta menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana masyarakat, khususnya mahasiswa, memahami dan merespon kebijakan tersebut. Ini penting karena mahasiswa adalah agen perubahan yang dapat memengaruhi pandangan dan partisipasi masyarakat lain. Transparansi anggaran pemerintah, khususnya pemerintah DKI Jakarta, merupakan salah satu komponen yang memengaruhi pemahaman mahasiswa tentang konsep *Smart City*. Transparansi anggaran berarti bahwa pemerintah selalu memberi tahu publik tentang pengelolaan anggaran negara atau daerah (Arsyi et al., 2024). Karena program teknologi *Smart City* seringkali memerlukan alokasi dana yang besar, transparansi anggaran sangat penting dalam konteks *Smart City*. Untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal, masyarakat harus mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan (Alifah et al., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara pemahaman mahasiswa tentang konsep *Smart City* dan peran transparansi anggaran pemerintah DKI Jakarta sebagai faktor moderasi. Di sisi lain, mahasiswa adalah kelompok yang sangat kritis terhadap kebijakan publik, sehingga pemahaman tentang konsep *Smart City* dapat mempengaruhi cara menilai kebijakan tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang transparan. Akibatnya, diharapkan transparansi anggaran dapat menjelaskan bagaimana anggaran digunakan untuk mendukung pembangunan *Smart City* dan bagaimana kebijakan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Darmadi et al., 2025). Mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan informasi melalui berbagai jenis media, termasuk media sosial. Dalam hal ini, media sosial pemerintah dapat berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan *Smart City* yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Media sosial pemerintah dapat menjadi alat yang efektif untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang bagaimana anggaran digunakan dan bagaimana program *Smart City* sedang dijalankan (Kencono et al., 2024). Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki akses yang lebih besar ke informasi. Namun, masalahnya adalah bahwa tidak semua orang dapat menerima informasi yang disebarkan melalui media sosial dengan cara yang sama. Misalnya, siswa dengan berbagai tingkat pendidikan dan pengetahuan dapat memiliki pemahaman yang berbeda tentang *Smart City*. Dalam konteks pembangunan kota cerdas, transparansi anggaran memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana dialokasikan untuk proyek teknologi yang mendukung pembangunan kota cerdas. Sebagai generasi penerus, mahasiswa diharapkan dapat memperkuat kebijakan ini dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dengan memastikan bahwa dana dialokasikan dengan benar dan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Informasi tentang kebijakan publik dan pengelolaan anggaran semakin mudah diakses melalui internet seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi. Melalui berbagai *platform* online, pemerintah DKI Jakarta telah berusaha untuk meningkatkan transparansi mengenai cara anggaran digunakan untuk mendukung program-program *Smart City*. Tetapi penelitian ini harus dilakukan untuk mengetahui apakah pemahaman mahasiswa tentang konsep *Smart City* benar-benar dipengaruhi oleh transparansi anggaran karena masih ada kendala dalam pemahaman masyarakat tentang rincian informasi yang disampaikan (Umarro et al., 2024). Selain itu, penting untuk diingat bahwa penerapan gagasan *Smart City* harus disertai dengan pemeriksaan yang terbuka atas anggaran yang telah digunakan (Hasibuan et al., 2024). Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat kritis, mahasiswa harus dididik tentang cara pemerintah mengelola sumber daya dan anggaran untuk membuat kota cerdas yang berkelanjutan. Studi ini akan menyelidiki apakah transparansi anggaran dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep *Smart City* dan bagaimana hal itu berdampak pada bagaimana berpartisipasi dalam pembangunan kota yang lebih baik.

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk proses pengembangan kebijakan *Smart City* di DKI Jakarta. Dengan memahami bagaimana transparansi anggaran dapat mempengaruhi pemahaman mahasiswa tentang *Smart City*, pemerintah dapat lebih baik merancang kebijakan yang melibatkan masyarakat, terutama generasi muda, dalam membangun kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan serupa di daerah lain yang ingin menerapkan konsep *Smart City* dengan mengedepankan transparansi anggaran sebagai kuncinya.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Background Mahasiswa

Berdasarkan penelitian ini akan dibagi menjadi 2 yaitu mahasiswa sosial dan mahasiswa non-sosial. Mahasiswa adalah kelompok yang beragam dengan latar belakang dan karakteristik. Mahasiswa dapat dibagi menjadi kelompok berdasarkan berbagai hal. Salah satunya adalah program studi atau jurusan yang membedakan mahasiswa sosial dari non-sosial. Kategori ini tidak hanya terkait dengan bidang studi, tetapi juga dapat memengaruhi cara orang melihat berbagai masalah, seperti transparansi anggaran pemerintah dan gagasan tentang kota pintar. Perbedaannya antara lain (1) mahasiswa di bidang sosial yang belajar di bidang ilmu sosial, seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, hubungan internasional, psikologi, antropologi, dan lain-lain, disebut mahasiswa sosial. Mahasiswa di jurusan ini biasanya lebih tertarik pada topik tentang masyarakat, interaksi sosial, dan masalah kemanusiaan. dididik untuk menganalisis, memahami, dan menyelesaikan masalah sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Mahasiswa sosial biasanya lebih peduli dengan masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik, keadilan sosial, dan pembangunan masyarakat. Akibatnya, lebih cenderung memahami konsep seperti kota pintar dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses ke layanan publik. Dengan demikian, mahasiswa sosial lebih cenderung menilai kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap kelompok tertentu. Selain itu, pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa sosial mengajarkan untuk lebih kritis terhadap transparansi anggaran pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana dana dialokasikan untuk program-program yang berdampak pada masyarakat banyak. Mahasiswa sosial biasanya akan menilai seberapa terbuka dan jelas alokasi dana untuk konsep *Smart City*, serta apakah kebijakan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. (2) Mahasiswa non-sosial adalah mahasiswa non-sosial adalah siswa yang belajar di bidang ilmu teknis atau natural, seperti teknik, ilmu komputer, kedokteran, sains, dan lain-lain. lebih fokus pada ilmu pengetahuan alam dan teknik serta penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. biasanya lebih berkonsentrasi pada masalah praktis dan teknis, dan cenderung menggunakan pendekatan berbasis data dan bukti untuk menyelesaikan masalah. Mahasiswa non-sosial, terutama mahasiswa ilmu komputer atau teknik, sering kali terlibat langsung dalam implementasi teknologi yang mendukung konsep *Smart City*, seperti pengembangan infrastruktur digital, sistem transportasi cerdas, atau pengelolaan data kota. lebih cenderung melihat *Smart City* dari sudut pandang teknologi dan inovasi, dengan fokus pada efisiensi operasional dan bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, mahasiswa non-sosial mungkin lebih memahami aspek teknis dari *Smart City*, tetapi mungkin tidak selalu terlibat langsung dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan publik atau alokasi anggaran. Akibatnya, pemahaman mahasiswa non-sosial tentang transparansi anggaran mungkin berbeda dengan mahasiswa sosial. Mahasiswa non-sosial mungkin lebih tertarik pada bagaimana anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur dan teknologi, tetapi mungkin kurang memahami bagaimana anggaran digunakan untuk tujuan tersebut.

Perbedaan antara mahasiswa sosial dan non-sosial ini memengaruhi cara melihat dan memahami kebijakan *Smart City* dan transparansi anggaran. Mahasiswa sosial yang berfokus pada studi sosial dan kemanusiaan cenderung lebih kritis terhadap keberpihakan kebijakan kepada masyarakat serta seberapa transparan dan adil pengelolaan anggaran. akan lebih mempertanyakan bagaimana anggaran untuk *Smart City* dapat membantu

semua orang, bukan hanya kelompok tertentu yang kaya atau berkuasa. Namun, siswa non-sosial lebih cenderung melihat *Smart City* sebagai solusi berbasis teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. lebih tertarik pada pengelolaan dana untuk pengembangan infrastruktur dan teknologi yang mendukung *Smart City*, dan lebih cenderung menerima proyek teknologi ini tanpa mempertanyakan dampak sosial atau distribusi anggaran. Tetapi kedua kelompok ini sangat penting untuk penelitian tentang transparansi anggaran pemerintah DKI Jakarta. Mahasiswa sosial memiliki kemampuan untuk menilai dampak sosial dan distribusi keadilan, sementara mahasiswa non-sosial memiliki kemampuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah teknis dan keberhasilan pelaksanaan program. Untuk memastikan bahwa *Smart City* yang dibangun benar-benar menguntungkan semua orang, keduanya perlu mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka tentang cara anggaran dialokasikan. Selain itu, perbedaan latar belakang ini memengaruhi seberapa aktif mahasiswa terlibat dalam diskusi atau aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan *Smart City*. Mahasiswa sosial cenderung lebih aktif terlibat dalam diskusi tentang kritik sosial terhadap kebijakan publik, keadilan, dan transparansi, sementara mahasiswa non-sosial mungkin lebih terlibat dalam hal-hal teknis seperti membangun sistem atau solusi teknologi. Pemahaman dan partisipasi mahasiswa terhadap konsep *Smart City* dan transparansi anggaran sangat dipengaruhi oleh latar belakang akademik. Oleh karena itu, penting untuk menjalin komunikasi yang lebih terbuka antara kelompok-kelompok ini untuk meningkatkan pemahaman yang luas tentang bagaimana *Smart City* dapat dibangun dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara transparan. Dengan memahami perbedaan latar belakang ini, pemerintah dapat lebih baik mendidik siswa tentang program *Smart City* dan melibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan yang lebih baik dan inklusif.

Smart City Concept

Konsep *Smart City* di Jakarta mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup orang, meningkatkan efisiensi pengelolaan kota, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan. Tujuan dari *Smart City* adalah untuk mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan kota, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga layanan publik yang berbasis teknologi, untuk menghasilkan kota yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan dan menerapkan berbagai program yang berfokus pada pembangunan kota pintar ini. Program-program ini berfokus pada penerapan teknologi untuk mengatasi masalah urbanisasi yang semakin kompleks, seperti polusi, kemacetan, pengelolaan sampah, dan pelayanan publik yang belum merata. Untuk membuat Jakarta menjadi kota yang lebih pintar dan nyaman untuk dihuni, berbagai bagian masyarakat, pemerintah, dan bisnis swasta bekerja sama untuk mewujudkan konsep *Smart City* ini antara lain (1) Infrastruktur Elektronik berupa komponen utama pembangunan kota pintar adalah pengembangan infrastruktur digital yang memungkinkan pertukaran dan konektivitas informasi secara cepat dan efisien. Di Jakarta, infrastruktur digital ini diwujudkan dengan pembangunan sistem pemerintahan digital, yaitu layanan publik yang berbasis teknologi yang mempermudah akses warga terhadap informasi dan layanan pemerintah. Salah satu contoh infrastruktur digital ini adalah aplikasi *Smart City* Jakarta, yang memungkinkan warga melaporkan bahwa informasi tentang apa yang diinginkan tentang pemerintah. Selain itu, Jakarta berusaha membangun smart grid untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan membangun jaringan internet dengan kecepatan tinggi untuk mendukung berbagai aplikasi berbasis teknologi di seluruh kota. Dalam banyak bidang, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, infrastruktur digital meningkatkan produktivitas. (2) Transportasi yang efektif berupa pendeteksian kemacetan lalu lintas adalah salah satu masalah terbesar di Jakarta. Untuk mengatasi masalah lalu lintas ini, Jakarta telah mulai menerapkan gagasan transportasi cerdas yang menggunakan teknologi untuk mengelola lalu lintas secara lebih efisien. Program Transportasi Smart Jakarta, misalnya, menggunakan aplikasi berbasis TIK untuk mengatur jadwal dan rute transportasi publik, serta membangun

pengelolaan lalu lintas yang lebih terintegrasi dan responsif. Selain itu, sistem transportasi berbasis data sedang dikembangkan di Jakarta. Sistem ini diharapkan dapat membantu merencanakan infrastruktur transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien dengan mengumpulkan data tentang pola perjalanan penduduk. Transportasi publik seperti transjakarta, KRL, dan angkutan umum berbasis aplikasi diharapkan dapat berjalan lebih terintegrasi dan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. (3) Pengelolaan Sampah dan Lingkungan bahwa konsep *Smart City* mencakup pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah DKI Jakarta telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi, seperti aplikasi yang melaporkan tempat pembuangan sampah ilegal dan melacak pengumpulan sampah di seluruh kota. Selain itu, Jakarta sedang berusaha menerapkan pengelolaan sampah pintar, yang dapat melacak tingkat kepadatan sampah di tempat umum melalui sensor dan memberikan informasi kepada petugas untuk mengoptimalkan pengangkutan. Untuk menjadikan Jakarta sebagai kota pintar dan lebih ramah lingkungan, juga ada fokus pada penggunaan energi terbarukan dan pengendalian polusi udara. Program seperti Jakarta Green City berusaha mengurangi dampak perubahan iklim dan mendorong keberlanjutan dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien untuk mengelola sumber daya alam. (4) Layanan Publik yang Berdasarkan Teknologi bahwa perlu adanya peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat adalah tujuan utama implementasi konsep *Smart City*. Untuk memfasilitasi layanan publik, pemerintah DKI Jakarta telah membangun berbagai *platform* digital, seperti *e-government*, yang memungkinkan orang melakukan transaksi administrasi, mengelola dokumen, dan layanan lainnya secara online tanpa harus ke kantor pemerintah langsung.

Aplikasi seperti Jakarta *Smart City* memungkinkan penduduk untuk mendapatkan informasi terbaru tentang program pemerintah dan melaporkan masalah atau keluhan. Selain itu, Jakarta mengembangkan smart healthcare dengan menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih efisien, seperti aplikasi konsultasi dokter online dan layanan digital lainnya. (5) Pengelolaan keuangan yang terbuka dan transparan yaitu transparansi anggaran juga penting untuk menerapkan *Smart City*. Pemerintah DKI Jakarta berusaha memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan *Smart City* dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Menyediakan akses terbuka bagi masyarakat untuk melacak alokasi dan penggunaan anggaran melalui *platform* digital merupakan bagian dari transparansi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang cerdas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, transparansi anggaran bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan informasi yang terbuka dan jelas, orang dapat melihat bagaimana anggaran digunakan, apakah sesuai dengan perencanaan, dan apakah program-program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal. (6) Penglibatan masyarakat dalam pembangunan *Smart City* bahwa penerapan implementasi konsep ini juga berfokus pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan *Smart City*. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program *Smart City* adalah semua upaya pemerintah DKI Jakarta untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi melalui aplikasi dan media sosial yang dikelola pemerintah adalah salah satu upaya untuk mendorong partisipasi ini. Diharapkan program *Smart City* yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menciptakan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan partisipasi masyarakat yang aktif. (7) Keamanan cyber dan keamanan bahwa konsep *Smart City* mengutamakan keamanan Jakarta. Sistem keamanan pintar yang diterapkan pemerintah DKI Jakarta meningkatkan keamanan publik dengan menggunakan teknologi seperti sensor cerdas dan kamera pengawas. Ditambah lagi, dengan berkembangnya teknologi digital, keamanan data dan data pribadi menjadi lebih penting. Untuk melindungi sistem *Smart City* dari serangan siber dan pelanggaran data, pemerintah kota Jakarta harus menerapkan kebijakan keamanan siber yang ketat. Ini akan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem yang ada. (8) Pengembangan teknologi dan inovasi menjelaskan bahwa Jakarta berusaha

untuk menjadi kota inovatif yang terus mengembangkan teknologi dan solusi baru untuk mengatasi berbagai tantangan urbanisasi. Ini dilakukannya melalui kerja sama dengan sektor swasta, lembaga penelitian, dan universitas untuk menghasilkan berbagai inovasi yang dapat membantu pembangunan kota yang lebih cerdas. Ini termasuk pengembangan aplikasi, *platform* digital, dan solusi berbasis teknologi yang memiliki kemampuan untuk mempercepat penerapan *Smart City* dan meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota cerdas yang terdepan di dunia.

Transparansi Anggaran Pemerintah

Transparansi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada seberapa transparan dan jelas pemerintah menyediakan, merencanakan, dan mengelola anggaran kepada masyarakat. Transparansi ini mencakup berbagai aspek tentang bagaimana pemerintah mengalokasikan dan menggunakan dana publik untuk berbagai kegiatan, proyek, dan layanan. Hal utama transparansi anggaran yang ada di DKI Jakarta adalah (1) Kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang anggaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan untuk menyediakan informasi anggaran yang jelas dan mudah diakses. Ini termasuk anggaran yang dialokasikan untuk layanan publik, program pembangunan, dan pengeluaran rutin pemerintah daerah. Informasi harus mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat umum, baik melalui *platform* digital maupun dokumen fisik. (2) Anggaran yang jelas dan detail bahwa anggaran yang transparan mencakup penyajian anggaran secara rinci, yang memungkinkan orang-orang melihat bagaimana dana dialokasikan untuk berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, antara lain. Penyajian yang jelas akan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman tentang penggunaan dana dan memungkinkan orang-orang memahami bagaimana pemerintah mengatur sumber daya. (3) Perhatian publik bahwa peran transparansi anggaran memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran pemerintah. Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, dapat membuat saluran di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik atau mengajukan pertanyaan tentang bagaimana dana publik digunakan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran. (5) Implementasi teknologi untuk transparansi yaitu untuk meningkatkan transparansi anggaran, pemerintah DKI Jakarta telah menggunakan berbagai *platform* digital dan sistem *e-government*. Misalnya, situs web resmi pemerintah atau aplikasi yang menyediakan data anggaran aktual dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dan proyek melalui teknologi ini. (5) Laporan dan Audit bahwa transparansi anggaran juga mencakup audit eksternal dan laporan tahunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan audit terhadap laporan keuangan dan melibatkan auditor independen untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tidak ada penyalahgunaan. Hasil audit kemudian disampaikan kepada publik, yang memastikan ada pemeriksaan independen terhadap penggunaan dana publik. (6) Anggaran yang bergantung pada kinerja. Selain itu, transparansi anggaran melibatkan pengungkapan tentang pencapaian yang diharapkan dari setiap pengeluaran. Anggaran berbasis kinerja digunakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Pendekatan ini mengaitkan biaya dengan hasil yang diharapkan, seperti peningkatan layanan publik atau pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Hal ini memberikan masyarakat gambaran yang lebih jelas tentang efek pengelolaan anggaran. (7) Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media bahwa media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memainkan peran penting dalam memantau transparansi anggaran pemerintah. Dengan bantuan pihak ketiga yang independen, transparansi anggaran dapat lebih terjamin dan memastikan bahwa dana digunakan dengan cara yang paling bermanfaat bagi masyarakat. (8) Indeks Keterbukaan Anggaran bahwa transparansi anggaran sebagai indikator kinerja pemerintah DKI Jakarta dalam hal keterbukaan anggaran. Indeks ini mengukur pemerintah daerah menyajikan informasi anggaran secara terbuka dan akurat kepada publik, serta masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan anggaran.

Penelitian terdahulu

Tabel 1 Penelitian Sebelumnya

Penulis	Hasil	Perbedaan & Kebaruan
Putra et al., (2024).	Penelitian membahas mengenai adanya alokasi, anggaran, serta partisipasi publik mengenai infrastruktur di Kota Langkat.	Penelitian ini menambahkan tambahan variabel *Smart City* yang dikaitkan dengan anggaran.
Safari et al., (2024).	Penelitian membahas penguatan tata kelola keuangan publik secara transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik.	Penelitian ini menambahkan kaitan terhadap pemahaman mengenai anggaran dan *Smart City.*
Fauzi & Hakim, (2024).	Penelitian membahas peran Digitalisasi serta pengelolaan terhadap pelayanan Publik Kota Kediri.	Penelitian ini menambahkan perbandingan dengan pendapat mahasiswa dikaitkan dengan digitalisasi di wilayah DKI Jakarta.
Maimanah & Nurdiono, (2024).	Penelitian membahas mengenai pendapat pegawai, kinerja pegawai di pemerintahan Kota Bandar Lampung.	Penelitian ini menambahkan kaitan pendapat mengenai mahasiswa mencakup lebih spesifik untuk lingkup kota besar seperti DKI Jakarta.
Kencono et al., (2024).	Penelitian membahas transformasi digital pada lingkup pemerintah, khususnya mengenai Big Data dan IoT.	Penelitian ini menambahkan moderasi transparansi anggaran untuk membuktikan peran *Smart City* di kota besar seperti DKI Jakarta.

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 1 menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan penelitian sebelumnya dan memberikan perbedaan dan kebaruan terhadap hipotesis.

Hipotesis

Hipotesis ini berpusat pada bagaimana latar belakang siswa non-sosial (seperti siswa dari teknik, komputer, atau bidang ilmu lainnya yang lebih terfokus pada teknologi dan sains) memengaruhi pemahaman tentang konsep *Smart City*. Pemahaman Konsep *Smart City* bahwa penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan kota untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan disebut "*Smart City*". Dalam konteks ini, pemahaman tentang *Smart City* termasuk infrastruktur digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti Internet of Things (IoT), big data, sistem transportasi pintar, manajemen energi, dan teknologi lainnya. Selain itu, background Mahasiswa Non-Sosial bahwa mahasiswa non-sosial berasal dari bidang ilmiah atau teknis, seperti teknik informatika, arsitektur, teknik sipil, atau bidang teknologi. Mahasiswa dari latar belakang ini biasanya lebih terbiasa dengan teknologi dan lebih sering terpapar pada konsep-konsep yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi. Selain itu, lebih mudah untuk memahami penerapan teknologi canggih dalam konteks pengelolaan sumber daya publik dan pembangunan kota. Alasan mengapa latar belakang mahasiswa non-sosial dapat membantu memahami konsep *Smart City* yaitu pendidikan teknologi yang kuat bahwa

mahasiswa non-sosial, terutama mahasiswa teknik dan teknologi, cenderung lebih memahami teknologi dan solusi masalah. Sistem transportasi pintar, pengelolaan energi, dan sistem keamanan berbasis data adalah contoh teknologi penting dalam *Smart City*. Paparan terhadap inovasi dan teknologi bahwa mahasiswa dari latar belakang non-sosial seringkali terpapar langsung pada tren terbaru dalam teknologi, yang memungkinkan untuk lebih mudah memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan kota yang lebih pintar. Munculnya keterbukaan terhadap ide-ide baru tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk pembangunan kota. Pemahaman secara terstruktur dan sistematis bahwa mahasiswa non-sosial memiliki kecenderungan untuk berpikir secara analitis dan sistematis, yang penting untuk memahami konsep-konsep kompleks seperti *Smart City*. Misalnya kaitan teori dengan aplikasi praktis, seperti cara teknologi canggih dapat diterapkan dalam perencanaan kota dan kebijakan publik. Keterkaitan dengan teknologi dan infrastruktur bahwa mahasiswa non-sosial belajar tentang banyak konsep *Smart City*, seperti sistem manajemen data, infrastruktur pintar, dan kota berkelanjutan (Yazid & Karmila, 2024). Oleh karena itu, mahasiswa yang memahami konsep-konsep lebih baik daripada siswa yang belajar sosial atau humaniora. Pendidikan yang berfokus pada sains dan teknologi membantu siswa memahami konsep-konsep yang sangat bergantung pada kemajuan teknologi, seperti *Smart City*. Mahasiswa non-sosial biasanya lebih familiar dengan teknologi dan lebih terampil dalam memahami komponen teknologi yang diperlukan untuk membuat kota pintar. Jika hipotesis ini sesuai, maka siswa non-sosial memiliki pemahaman yang lebih baik tentang *Smart City* karena latar belakang pendidikan yang lebih berfokus pada teknologi dan inovasi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis teknologi memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman generasi muda tentang pengelolaan kota masa depan yang didorong oleh teknologi.

H1: Background Mahasiswa Non-Sosial (Eksakta) Berpengaruh Positif Terhadap Pemahaman Smart City Concept

Hipotesis ini berfokus pada bagaimana background mahasiswa sosial (misalnya mahasiswa dari jurusan ilmu sosial, ekonomi, hukum, atau politik) mempengaruhi pemahaman tentang konsep *Smart City*. Hal ini termasuk (1) Pemahaman Konsep *Smart City* bahwa "*Smart City*" berasal dari pada penggunaan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas hidup, dan keberlanjutan di kota-kota, konsep ini juga mencakup dimensi sosial dan kebijakan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, kualitas layanan publik, dan partisipasi warga dalam proses pemerintahan dan pembangunan kota (Fauzi & Hakim, 2024). Mahasiswa sosial biasanya berasal dari jurusan dengan fokus studi sosial, ekonomi, hukum, politik, atau ilmu perilaku manusia. Dididik untuk memahami dinamika sosial, masalah kebijakan publik, dan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ada kecenderungan lebih memahami aspek sosial dan humanistik dari pembangunan, yang sangat relevan dalam konteks kota pintar yang bergantung pada teknologi tetapi juga pada kebijakan sosial, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial. Alasan mengapa background sosial siswa dapat membantu untuk memahami konsep *Smart City* yaitu (1) Pemahaman sosial dan kebutuhan masyarakat bahwa mahasiswa sosial seringkali memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah sosial, ketimpangan, dan kebutuhan dasar masyarakat. *Smart City* dipandang dari sudut pandang teknologi, serta dari sudut pandang meningkatkan kualitas hidup penduduk, pengurangan ketimpangan sosial, dan peningkatan akses ke layanan publik. Dalam pembangunan kota pintar, konsep seperti keadilan sosial, pemerataan sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat sangat relevan (Nasution & Siregar, 2025). Peran kebijakan publik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat sering dibahas oleh mahasiswa sosial. Kebijakan publik yang mendukung penggunaan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang sangat penting dalam konteks kota pintar (Maimanah & Nurdiono, 2024). Kebijakan publik ini mungkin lebih memperhatikan bagaimana teknologi dan infrastruktur dapat digunakan secara adil dan bermanfaat bagi semua warga, bukan hanya berdasarkan kecanggihan teknologi. Partisipasi masyarakat dan pemerintahan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan komponen penting dalam

pembangunan *Smart City*. Mahasiswa sosial cenderung lebih memahami betapa pentingnya bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa dianggap dapat memahami bagaimana penggunaan teknologi dalam *Smart City* dapat membuat masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan seperti pengelolaan sampah atau transportasi. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi bahwa mahasiswa sosial biasanya dididik untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan atau teknologi tertentu. Dalam situasi seperti ini, dapat mengaitkan penerapan teknologi *Smart City* dengan dampaknya terhadap masyarakat, seperti akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta bagaimana hal itu berdampak pada ekonomi lokal dan lapangan kerja. Pendekatan Multidisipliner menjelaskan bahwa mahasiswa sosial sering terpapar pada konsep-konsep yang berasal dari bidang yang berbeda, seperti teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini dapat menghubungkan dimensi-dimensi ini dalam memahami konsep *Smart City*, yang tidak hanya berfokus pada teknologi tetapi juga pada kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat. Ini terlepas dari latar belakang akademik yang lebih berfokus pada ilmu sosial.

Mahasiswa sosial akan memiliki pemahaman yang lebih luas tentang konsep kota pintar karena tidak hanya melihat dari sudut pandang teknologi tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang mendukung pembentukan kota pintar yang adil dan inklusif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pendidikan yang berfokus pada analisis sosial dan kebijakan publik dapat memperkuat pemahaman siswa tentang konsep kota pintar.

H2: Background Mahasiswa Sosial Berpengaruh Positif Terhadap Pemahaman Smart City Concept

Hipotesis berdasarkan dua variabel utama yaitu latar belakang mahasiswa non-sosial dan transparansi anggaran pemerintah DKI Jakarta, dan bagaimana transparansi anggaran memoderasi hubungan antara latar belakang mahasiswa non-sosial dan pemahaman tentang konsep *Smart City*. Mahasiswa non-sosial biasanya berasal dari jurusan yang lebih berfokus pada bidang ilmiah atau teknis, seperti ilmu komputer, teknik informatika, teknik sipil, atau arsitektur. cenderung lebih memahami aspek teknologi, infrastruktur, dan sistem yang terlibat dalam gagasan *Smart City*, yang bergantung pada kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup di kota-kota besar. Mahasiswa non-sosial yang memiliki pengetahuan teknis biasanya lebih mudah memahami dan menghargai peran teknologi seperti Internet of Things (IoT), Big Data, dan sistem manajemen kota pintar dalam menciptakan solusi untuk masalah perkotaan seperti pengelolaan energi, kemacetan, dan sistem transportasi dan keamanan yang lebih efisien. Ini karena fokus pendidikan pada teknologi (Safari et al., 2024). Infrastruktur pintar, pengelolaan energi yang efisien, sistem transportasi yang cerdas, dan penggunaan teknologi dalam layanan publik adalah semua contoh dari konsep *Smart City* dalam pembangunan kota. Melalui penggunaan teknologi yang terintegrasi, masyarakat dan sektor pemerintahan bekerja sama untuk membuat kota yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Bagi mahasiswa non-sosial, keterampilan teknologi dan penerapan sistem canggih untuk mengatasi masalah perkotaan dapat memengaruhi pemahaman tentang konsep *Smart City*. Namun, transparansi dalam pengelolaan anggaran yang mendukung pengembangan teknologi dan infrastruktur juga dapat memengaruhi pemahaman. Transparansi anggaran adalah ketika pemerintah mengungkapkan informasi tentang bagaimana dana publik digunakan untuk berbagai kebijakan dan proyek. Transparansi anggaran di DKI Jakarta sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap cara sumber daya digunakan untuk pengembangan kota pintar. Pengungkapan anggaran yang jelas dan mudah diakses memungkinkan masyarakat, termasuk siswa, untuk memahami bagaimana anggaran digunakan untuk mendukung proyek *Smart City* yang menerapkan berbagai teknologi. Mahasiswa yang melihat alokasi anggaran yang terbuka dan terarah untuk pengembangan infrastruktur pintar akan lebih mudah memahami betapa pentingnya perencanaan keuangan yang efisien dalam mencapai tujuan *Smart City*. juga akan lebih mudah memahami betapa pentingnya investasi yang tepat sasaran dalam teknologi dan infrastruktur sebagai bantuan pendidikan. Mahasiswa non-sosial

yang lebih memahami teknologi dan inovasi cenderung melihat konsep *Smart City* dengan lebih baik ketika diterapkan. mungkin lebih menghargai kebijakan yang berbasis data dan teknologi dalam mengatasi masalah perkotaan, yang merupakan komponen penting dari konsep *Smart City*. Hal ini diharapkan untuk menjaga Konsistensi melalui Transparansi Anggaran, karena transparansi anggaran dapat mengurangi dampak latar belakang siswa non-sosial terhadap pemahaman tentang kota pintar. Selanjutnya kedepannya diharapkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah yaitu saat anggaran transparan, siswa melihat bahwa pengelolaan anggaran pemerintah DKI Jakarta mendukung tujuan jangka panjang untuk menerapkan teknologi dalam pembangunan kota. Dengan anggaran yang terbuka, siswa non-sosial lebih memahami pentingnya pengelolaan dana yang efisien untuk mewujudkan konsep *Smart City*. Hal ini memberikan perkembangan bahwa ada hubungan teknologi dengan alokasi dana karena mahasiswa non-sosial dengan latar belakang teknis mungkin cenderung berfokus pada solusi teknologi. Namun, dengan transparansi anggaran, sehingga lebih mudah melihat hubungan antara pengeluaran pemerintah dan penerapan teknologi yang mendukung *Smart City* (Sulaiman et al., 2024). Misalnya, bisa melihat bagaimana alokasi dana untuk infrastruktur IT, sistem transportasi pintar, atau program pengelolaan energi sejalan dengan implementasi. Selanjutnya, ini dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pemahaman bmahasiswa non-sosial yang memahami pentingnya anggaran yang jelas dan terstruktur akan lebih cenderung untuk memahami bahwa keberhasilan proyek *Smart City* tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi tetapi juga pada keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan dana. Hipotesis ini mengatakan bahwa siswa non-sosial yang memiliki latar belakang teknis lebih memahami *Smart City* lebih baik daripada siswa sosial. Namun, transparansi anggaran dapat memoderasi pengaruh latar belakang ini, membuat siswa lebih memahami betapa pentingnya alokasi anggaran yang transparan dan efisien untuk mencapai tujuan *Smart City*. Mahasiswa yang melihat transparansi anggaran sebagai faktor pendukung dalam pengembangan teknologi menjadi lebih efektif. Hipotesis ini menunjukkan bahwa latar belakang siswa non-sosial memengaruhi pemahaman tentang konsep *Smart City*. Pengaruh ini akan semakin besar ketika anggaran pemerintah DKI Jakarta menjadi lebih transparan dan terbuka.

H3: Background Mahasiswa Non-sosial (Eksakta) Berpengaruh Positif Terhadap Pemahaman Smart City Concept Dimoderasi Dengan Transparansi Anggaran Pemerintah DKI Jakarta

Mahasiswa dengan latar belakang sosial lebih memahami dinamika masyarakat dan kebijakan publik, yang membantu untuk memahami konsep *Smart City*. Latar belakang ini juga memberi pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat memperbaiki sistem pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mahasiswa sosial di DKI Jakarta, di mana pembangunan *Smart City* adalah prioritas utama pemerintah, lebih mudah memahami bagaimana konsep ini diterapkan karena terbiasa menganalisis kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat. Akibatnya, lebih mampu menilai seberapa efektif dan relevan berbagai inisiatif *Smart City* yang dijalankan pemerintah.

Mahasiswa sosial menggunakan pendekatan multidisipliner untuk lebih memahami *Smart City*. Sudut pandang sosial, ekonomi, dan politik selain dari sudut pandang teknologi. Sebagai contoh, mahasiswa sosial dapat menghubungkan ide tentang kota pintar dengan teori tentang partisipasi masyarakat, inklusi sosial, dan efektivitas kebijakan publik. Pemahaman yang menyeluruh ini membuat kekritisan dalam menentukan apakah kebijakan *Smart City* Jakarta benar-benar inklusif dan menguntungkan semua orang. Namun, transparansi pengelolaan anggaran pemerintah DKI Jakarta juga memengaruhi pemahaman mahasiswa sosial tentang *Smart City*. Mahasiswa dapat melihat bagaimana dana publik dialokasikan untuk membangun infrastruktur dan layanan berbasis teknologi. Dengan informasi yang terbuka, mahasiswa sosial dapat menilai kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan. Transparansi anggaran berfungsi sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan antara latar belakang sosial mahasiswa dan pemahaman tentang *Smart City*. Ketika informasi anggaran tersedia, mahasiswa sosial memiliki data konkret yang dapat digunakan untuk menilai keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pemerintah. Selain itu, transparansi ini

mendorong mahasiswa untuk lebih terlibat dalam diskusi publik, penelitian, dan advonon-kasi kebijakan yang mendukung.

H4: Background Mahasiswa Sosial Berpengaruh Positif Terhadap Pemahaman Smart City Concept Dimoderasi Dengan Transparansi Anggaran Pemerintah DKI Jakarta.

Rumusan Penelitian

Sebelum Moderasi

Untuk mahasiswa non-sosial

$PM_{it}= a_{it}+BMit+Tai_{tt}+e_{it}$…….(1)

Untuk mahasiswa sosial

$PM_{it}= a_{it}+BMit+Tai_{tt}+e_{it}$…….(2)

Setelah Moderasi

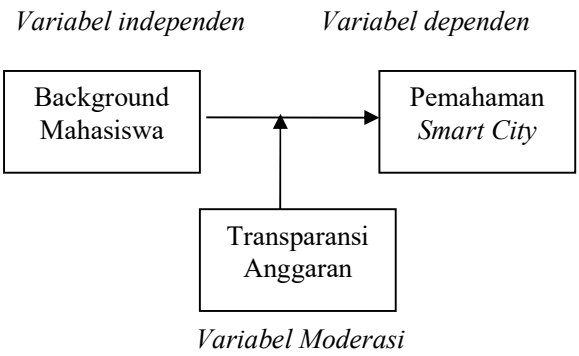
Untuk mahasiswa non-sosial

$PM_{it}= a_{it}+BMit+Tai_{tt}+e_{it}$…….(3)

Untuk mahasiswa sosial

$PM_{it}= a_{it}+BMit*Tai_{tt}+e_{it}$…….(4)

Kerangka Penelitian



Gambar 1
Kerangka Penelitian

Sumber: Diolah penulis (2025)

Gambar 1 menjelaskan tentang kerangka penelitian yang dibahas. Variabel dependen yaitu Pemahaman *Smart City*. Variabel independen yaitu Background Mahasiswa dan variabel moderasi adalah transparansi anggaran. Hal ini memberikan penjelasan dari (Aulia et al., 2024; Fauzi & Hakim, 2024; Kencono et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel penelitian berjumlah 208 orang mahasiswa yang berada di wilayah Jakarta, terdiri dari mahasiswa rumpun sosial (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial Politik, dan FKIP) serta mahasiswa rumpun non-sosial (Teknik, MIPA, dan Kesehatan). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, kriteria yang digunakan adalah (1) Responden merupakan mahasiswa aktif yang berdomisili atau berkuliah di Jakarta. (2) Responden berasal dari rumpun sosial atau non-sosial, sehingga memungkinkan adanya perbandingan antar kelompok.

Penggunaan purposive sampling dipilih karena penelitian ini ingin membandingkan pemahaman mahasiswa berdasarkan karakteristik akademik (sosial vs non-sosial) dan wilayah tertentu, sehingga sampel tidak diambil secara acak, melainkan dipilih sesuai relevansi dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sekaligus membandingkan perbedaan di antara kelompok responden.

Tabel 2 Penelitian Sebelumnya

Var.	Definisi Operasional	Indikator
X1 (Background Mahasiswa)	Latar belakang akademik mahasiswa yang dapat mempengaruhi cara pandang dan pemahamannya terhadap isu *Smart City*, khususnya dalam konteks anggaran.	Latar belakang sosial vs non-sosial, pengalaman belajar, akses informasi *(likert 1-5).*

Z (Transparansi Anggaran)	Tingkat keterbukaan informasi anggaran pemerintah yang dapat memoderasi hubungan antara latar belakang mahasiswa dengan pemahaman *Smart City*.	Ketersediaan informasi, kemudahan akses, kejelasan, dan akuntabilitas *(likert 1-5).*
Y (Pemahaman *Smart City*)	Tingkat pemahaman mahasiswa mengenai konsep *Smart City*, terutama terkait aspek anggaran dan digitalisasi layanan publik.	Pengetahuan konsep, pemahaman implementasi, keterkaitan dengan layanan publik *(likert 1-5).*

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 2 menjelaskan definisi operasional variabel penelitian yang terdiri dari variabel independen (X1 Background Mahasiswa), variabel moderasi (Z Transparansi Anggaran), dan variabel dependen (Y Pemahaman *Smart City*). Variabel X1 dijelaskan sebagai latar belakang akademik mahasiswa yang dapat memengaruhi cara pandang dan pemahaman terhadap isu *Smart City*, dengan indikator berupa perbedaan latar belakang sosial maupun non-sosial, pengalaman belajar, serta akses informasi. Variabel Z mencerminkan tingkat keterbukaan informasi anggaran pemerintah yang berfungsi sebagai faktor moderasi, dengan indikator berupa ketersediaan informasi, kemudahan akses, kejelasan, dan akuntabilitas. Sedangkan variabel Y diartikan sebagai tingkat pemahaman mahasiswa mengenai konsep *Smart City*, khususnya terkait aspek anggaran dan digitalisasi layanan publik, dengan indikator berupa pengetahuan konsep, pemahaman implementasi, serta keterkaitan dengan layanan publik.

Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Hasilnya semua variabel r hitung > r tabel pada taraf signifikansi 0,05. Semua pertanyaan penelitian diterima.

Tabel 3 Uji Validitas X1 Background Mahasiswa

Item	r-hitung	r-tabel
X1_1	0,612	0,138
X1_2	0,545	0,138
X1_3	0,731	0,138
X1_4	0,487	0,138
X1_5	0,668	0,138
X1_6	0,593	0,138

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 3 menjelaskan hasil uji validitas instrumen variabel X1 (Background Mahasiswa) yang terdiri dari enam item pernyataan. Berdasarkan hasil pengujian, nilai r-hitung untuk r-hitung>r-tabel 0,138. Hal ini berarti semua item pernyataan yang digunakan dalam variabel X1 dinyatakan valid.

Tabel 4 Uji Validitas Z (Transparansi Anggaran)

Item	r-hitung	r-tabel
Z_1	0,652	0,138
Z_2	0,709	0,138
Z_3	0,584	0,138
Z_4	0,762	0,138
Z_5	0,536	0,138
Z_6	0,605	0,138

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 4 menampilkan hasil uji validitas instrumen variabel Z (Transparansi Anggaran) yang terdiri dari enam item pernyataan. Hasil

pengujian menunjukkan bahwa seluruh nilai r-hitung (0,536–0,762> r-tabel 0,138. Semua data dinyatakan valid.

Tabel 5 Uji Validitas Y Pemahaman *Smart City*

Item	r-hitung	r-tabel
Y_1	0,677	0,138
Y_2	0,738	0,138
Y_3	0,559	0,138
Y_4	0,721	0,138
Y_5	0,498	0,138
Y_6	0,646	0,138

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 5 menyajikan hasil uji validitas instrumen variabel Y (Pemahaman *Smart City*) yang terdiri dari enam item pernyataan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh nilai r-hitung> r-tabel sebesar 0,138, r-hitung antara 0,498-0,738. Hal ini membuktikan bahwa semua item pernyataan valid.

Tabel 6 Uji Reabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kriteria
X1	6	0,812	≥ 0,70
Z	6	0,876	≥ 0,70
Y	6	0,884	≥ 0,70

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 6 menjelaskan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian yang meliputi variabel X1 (Background Mahasiswa), Z (Transparansi Anggaran), dan Y (Pemahaman *Smart City*). Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha> 0,70, yaitu 0,812 untuk X1, 0,876 untuk Z, dan 0,884 untuk Y. Nilai tersebut menunjukkan bahwa valid.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 7 Gender

Keterangan	Jumlah
Laki-laki	33
Perempuan	155
Total	208

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 7 memberikan penjelasan mengenai gender sebagai responden yaitu 53 orang (laki-laki), perempuan (155 orang), sehingga jumlah yang paling banyak mengisi adalah 155 orang sebesar 74,52%.

Tabel 8 Umur

Keterangan	Jumlah
<17 tahun	9
17-25 tahun	196

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 8 menjelaskan mengenai umur peneliti, dikarenakan yang mengisi kuisioner adalah mahasiswa dengan jumlah sebanyak 196 orang. Hal ini membuktikan bahwa jumlah responden berada pada umur 17-25 tahun sebanyak 94,23%.

Tabel 9 Lokasi

Keterangan	Jumlah
Jakarta Barat	70
Jakarta Timur	28
Jakarta Utara	48
Jakarta Selatan	50
Jakarta Pusat	12

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 9 menjelaskan tempat tinggal responden yang berada di wilayah Jakarta yaitu Jakarta Barat 70 orang sebesar 33,65%, Jakarta Timur yaitu 28 orang sebesar 13,46%, Jakarta Utara

48 orang sebesar 23,07%, Jakarta Selatan 50 orang sebesar 24,03%, Jakarta Pusat 12 orang sebesar 5,85%. Hal ini memberikan informasi bahwa responden didominasi Jakarta Barat sebanyak 33,65%, ini dikarenakan karena perguruan tinggi swasta (PTS) banyak berada di wilayah Jakarta Barat dibanding dengan lainnya.

Tabel 10 Sebaran

Keterangan	Jumlah
Mahasiswa Sosial	115
Mahasiswa Non-Sosial (Eksakta)	93

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 10 menjelaskan tentang sebaran jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswa sosial mendominasi sebesar 115 orang (55,29%) dan mahasiswa non-sosial sebesar 93 orang (44,71%).

Tabel 11 Fakultas

Keterangan	Jumlah
FEB	76
FISHIP	21
FH	18
FKIP	9
MIPA	22
FT	62

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 11 menjelaskan fakultas mahasiswa yang menjadi responden. FEB berada pada posisi pertama yatitu 76 orang (36,53%) dari semua fakultas, selanjutnya adalah FT 62 orang (29,80%). Terendah adalah FKIP sebanyak 9 orang 4,32%. Hal ini membuktikan bahwa yang paling banyak mengisi adalah FEB (rumpun sosial) dikarenakan FEB merupakan salah satu fakultas favorit di lingkup Universitas Negeri dan Swasta.

Tabel 12 Statistik Deskriptif

Var.	Obs.	Mean	Std.Dev	Min
BM	208	5.920123	0.374902	3
TA	208	5.874922	0.303331	3
PM	208	5.3128371	0.398006	3

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 12 menjelaskan tentang statistik dekriptif dengan nilai terbesar adalah BM yaitu dengan nilai 5.920123 dan terendah adalah PM sebesar 5.3128371. Hasil ini membuktikan bahwa nilai mean antar variabel tidak terlalu jauh secara signfikan. Untuk pengisian kuisioner minimal skor yang diisi adalah 3 (netral). Hasil ini memberikan penilaian bahwa perubahan skor tidak terlalu signifikan masih berada pada range 0.3 yaitu 0.374902, 0.303331 dan 0.398006.

Tabel 13 Hasil untuk Mahasiswa Non-Sosial (Sebelum Moderasi)

Var.	Coef.	t	P>t	Res.
BM	-.001836	-0.018	0.021	Effect (H1)
TA	-.001673	-1.54	0.017	-
PM	6.35382	21.81	0.000	-

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 13 menjelaskan bahwa Background Mahasiswa Non-Sosial (Eksakta) Berpengaruh Positif Terhadap Pemahaman *Smart City* Concept, hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Fauzi & Hakim, 2024). Hasil ini juga membuktikan bahwa (1) lebih banyak mahasiswa yang berasal dari latar belakang eksakta (non-sosial) lebih memahami konsep *Smart City*. Hal ini menjadi bukti bahwa mahasiswa eksakta lebih terbiasa dengan elemen teknologi seperti Internet of Things (IoT), AI (Artificial Intelligence), dan infrastruktur cerdas, yang merupakan dasar konsep *Smart City*. Mahasiswa juga lebih terbiasa dengan teknologi, sistem digital, dan analisis berbasis data. Kaitannya dengan teori penerapan *Smart City*, hasil ini mendukung pandangan bahwa latar belakang pendidikan,

disiplin ilmu, dan kapasitas akademik memengaruhi cara individu memahami integrasi teknologi digital dalam tata kelola kota. Teori *Smart City* menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat yang beragam (multi-stakeholder) untuk mendorong transparansi, partisipasi, dan efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian, meskipun mahasiswa non-sosial memiliki kontribusi, perbedaan disiplin ilmu membuat tingkat pemahaman tidak selalu meningkat seiring latar belakang, namun lebih ditentukan oleh pengetahuan konsep transparansi, teknologi, dan digitalisasi dalam konteks perkotaan.

Tabel 14 Hasil untuk Mahasiswa Sosial (Sebelum Moderasi)

Var.	Coef.	t	P>t	Res.
BM	-.001730	-0.004	0.038	Effect (H2)
TA	-.001546	-1.20	0.035	-
PM	4.95837	16.09	0.000	-

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 14 menjelaskan bahwa Background Mahasiswa Sosial Berpengaruh Positif Terhadap Pemahaman *Smart City* Concept, hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu (Fauzi & Hakim, 2024; Kencono et al., 2024). Hasil ini membuktikan bahwa (1) semakin banyak siswa dari latar belakang sosial yang memahami konsep *Smart City*. (2) Mahasiswa ilmu sosial lebih berkonsentrasi pada elemen kebijakan publik, tata kelola kota, dan dampak sosial *Smart City*, yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan konsep tersebut. Hal ini memberikan kecenderungan bahwa teknologi dapat memengaruhi masyarakat, aspek sosial, ekonomi, dan budaya suatu kota. (3) Mahasiswa juga lebih memahami konsep keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan etika penggunaan teknologi dalam *Smart City*. Hasil ini sejalan dengan teori penerapan *Smart City*, yang menekankan perlunya partisipasi publik, transparansi, serta pemahaman masyarakat terhadap isu-isu digitalisasi tata kelola kota. Mahasiswa sosial yang terbiasa dengan kajian kebijakan publik, akuntabilitas, serta isu sosial-politik, relatif lebih mudah memahami peran transparansi dan digitalisasi dalam penerapan *Smart City*. Namun, arah negatif pada variabel BM menunjukkan bahwa latar belakang semata tidak cukup meningkatkan pemahaman, melainkan harus ditopang oleh pengalaman belajar, keterpaparan informasi, dan kemampuan kritis dalam mengaitkan teori dengan praktik kebijakan publik.

Tabel 15 Hasil untuk Mahasiswa Non-Sosial (Setelah Moderasi)

Var.	Coef.	t	P>t	Res.
BM* TA	-.001289	-0.032	0.023	Effect (H3)
PM	3.95088	14.40	0.000	-

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 15 menjelaskan bahwa Background Mahasiswa Non-sosial (Eksakta) Berpengaruh Positif Terhadap Pemahaman *Smart City* Concept Dimoderasi Dengan Transparansi Anggaran Pemerintah DKI Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Fauzi & Hakim, 2024; Putra et al., 2024). Hasil ini membuktikan bahwa (1) Mahasiswa dari latar belakang eksakta (non-sosial) memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep *Smart City* dibandingkan dengan mahasiswa dari latar belakang sosial. (2) Kepercayaan mengenai transparansi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan *Smart City* dianggap sudah efektif. Hasil ini sejalan dengan teori penerapan *Smart City*, yang menekankan pada integrasi antara aspek teknologi (hard infrastructure) dan tata kelola (good governance). Mahasiswa non-sosial, yang umumnya memiliki basis ilmu di bidang teknologi, kesehatan, atau sains, cenderung memahami aspek teknis *Smart City*. Namun, dengan adanya transparansi anggaran sebagai mekanisme moderasi, terdorong untuk melihat dimensi governance seperti akuntabilitas dan akses informasi publik yang merupakan fondasi penting *Smart City*.

Tabel 16 Hasil untuk Mahasiswa Sosial (Setelah Moderasi)

Var.	Coef.	t	P>t	Res.
BM* TA	-.001928	-0.017	0.017	Effect (H4)
PM	5.027402	19.03	0.000	-

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 16 menjelaskan bahwa Background Mahasiswa Sosial Berpengaruh Positif Terhadap Pemahaman *Smart City* Concept Dimoderasi Dengan Transparansi Anggaran Pemerintah DKI Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Fauzi & Hakim, 2024; Santi et al., 2024). Hasil ini membuktikan bahwa (1) Mahasiswa dari latar belakang sosial juga mempunyai ketertarikan mengenai *Smart City*, dikarenakan berada di wilayah kota besar. (2) Mahasiswa dari prodi sosial cukup memahami kemajuan teknologi saat ini. Temuan ini selaras dengan teori penerapan *Smart City*, yang menekankan pada dimensi governance, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi publik. Mahasiswa rumpun sosial umumnya memiliki kepekaan lebih terhadap aspek sosial, hukum, dan kebijakan. Dengan adanya moderasi transparansi anggaran, pemahaman mengenai *Smart City* tidak hanya dipengaruhi oleh latar akademik, tetapi juga semakin diperkuat oleh pemahaman terhadap akuntabilitas, aksesibilitas informasi, dan kejelasan dalam pengelolaan anggaran publik.

Tabel 17 VIF

Mean VIF	2.092

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 17 menjelaskan tentang VIF pada penelitian ini yaitu skor 2.092. hal ini membuktikan bahwa penelitian ini bebas multikolinearitas karena nilai <10.

6. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana latar belakang mahasiswa memengaruhi pemahaman tentang konsep *Smart City*, dengan transparansi anggaran pemerintah DKI Jakarta sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang mahasiswa, termasuk tingkat pendidikan, tingkat pemahaman tentang teknologi, dan pengalaman akademik, berpengaruh secara signifikan pada bagaimana mahasiswa melihat pelaksanaan konsep *Smart City*. Selain itu, mahasiswa memiliki pemahaman yang berbeda tentang *Smart City*, tergantung pada sumber informasi dan cara memahami kebijakan pemerintah. Terbukti bahwa transparansi anggaran pemerintah DKI Jakarta berfungsi sebagai pemoderasi. Ketika anggaran transparan, mahasiswa lebih mudah menilai program *Smart City* dan memahami bagaimana anggaran dialokasikan untuk mendukung layanan dan infrastruktur berbasis teknologi. Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya transparansi anggaran dapat menghambat pemahaman mahasiswa tentang konsep *Smart City*. Ketidakjelasan pengelolaan anggaran menimbulkan skeptisisme dan menurunkan kepercayaan terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi publik harus tersedia secara terbuka, termasuk bagi mahasiswa. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang mahasiswa sangat penting dalam pemahaman tentang konsep *Smart City*, dan transparansi anggaran pemerintah memiliki dampak moderasi yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih jelas dan edukatif perlu diterapkan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pembangunan *Smart City* di DKI Jakarta.

Implikasi praktis yaitu (1) Bagi Pemerintah Daerah (DKI Jakarta) yaitu Pemerintah perlu meningkatkan transparansi anggaran melalui portal digital yang lebih interaktif dan mudah dipahami mahasiswa maupun masyarakat luas. Program edukasi publik seperti seminar, sosialisasi, atau workshop tentang *Smart City* perlu melibatkan mahasiswa sebagai target utama untuk agen literasi kebijakan di lingkungan akademik Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan universitas dalam bentuk kolaborasi riset, magang, dan program pengabdian masyarakat terkait implementasi *Smart City*. (2) Bagi Universitas bahwa Universitas dapat mengintegrasikan materi tentang *Smart City*, literasi digital, dan transparansi anggaran ke dalam kurikulum, terutama di fakultas sosial maupun non-sosial. Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam penelitian, diskusi publik, dan proyek kolaboratif terkait *Smart City*

sehingga pemahaman lebih aplikatif dan kritis. Universitas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan kajian akademik dan solusi inovatif untuk mendukung pengembangan *Smart City*. (3) Bagi Pembuat Kebijakan bahwa Penelitian ini menegaskan pentingnya merancang kebijakan berbasis transparansi, partisipasi, dan literasi digital publik. Pembuat kebijakan perlu menyusun strategi komunikasi publik yang inklusif agar mahasiswa dan masyarakat dapat lebih memahami serta mendukung implementasi *Smart City*. Transparansi anggaran harus dipandang bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap kebijakan *Smart City*. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu (1) memperluas sampel secara nasional dan menambahkan variabel baru seperti literasi digital atau partisipasi publik, (2) menggunakan metode kualitatif seperti wawancara atau studi kasus (3) menganalisis efektivitas transparansi anggaran terhadap partisipasi masyarakat, dan (4) melakukan studi perbandingan dengan kota lain, baik di dalam maupun luar negeri.

7.DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Alifah, N., Izzati, N., & Azijah, D. N. (2024). Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Wancimekar Menuju Konsep Smart Village. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Jtik)*, *15*(1), 6–13. https://doi.org/10.51903/jtikp.v15i1.627

Arsyi, A., Huroidhoh, S., Optafiyacha, S. A., & Fatkhuri. (2024). Analisis Portal Open Data KPU (opendata.kpu.go.id) dalam Mendukung Open Government di Indonesia pada Tahun 2024. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, *6*(1), 118–132. https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4631

Aulia et al. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research (JSR)*, *2*(2), 79–86. https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809

Darmadi, R., Nugraha, M., Fadlilah, F., Suryadithia, R., & Kautsar, H. A. Al. (2025). Implementasi Smart Governance Melalui Layanan Digital Berbasis Web di Desa Jamali Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA: Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan Kepada Masyarakat*, *6*(1), 199–208. https://doi.org/10.33394/jpu.v6i1.14558

Fauzi, A. R., & Hakim, A. (2024). Digitalisasi terhadap Pelayanan Publik (Implementasi Digitalisasi Terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Kediri dan Kabupaten Jember). *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(10), 3727–3734. https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6146

Hasibuan, I. M. S., Irfan, Sari, M., & Sari, E. N. (2024). Moderation Of Government Accounting Standards In The Relationship Of Public Accountability, Public Transparency And Oversight Of Apbd Management. *KAJIAN AKUNTANSI Universitas Islam Bandung*, *25*(1), 121–130.

Kencono et al. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *7*(2), 1498–1506. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519

Maimanah, A., & Nurdiono, N. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(2), 178–202. https://doi.org/10.51903/manajemen.v5i1.874

Nasution, D. M., & Siregar, S. W. (2025). Analisis Sistem Pelayanan Asuransi Dana Pensiun Pt Taspen Cabang Medan Di Setda Provsu. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *5*(1), 1–11. https://doi.org/10.51903/manajemen.v5i1.874

Putra et al. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat Untuk Meningkatkan Kenyamanan Masyarakat. *Jurnal Darma Agung*, *32*(4), 60–74. https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4631

Safari et al. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, *10*(5), 3036–3040. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3184

Santi, Y. E., Siswadi, U., & Rahayu, M. M. (2024). Pengaruh Pandangan Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak. *Studia Akuntansi*, *12*(1), 1–8. https://doi.org/10.35326/jiam.v7i2.6411

Sulaiman, Listiana, Y. D., & Trimawarni, A. (2024). Pelatihan Dan Pendampingan Penguatan Kapasitas Asn Dalam Penerapan Good Governance Di Kota Pontianak. *AKSIME: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(4), 8–17. https://doi.org/10.32503/aksime.v1i4.6262

Umarro, S. P., Zulkifli, & W, A. M. (2024). Strategi Good Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah (Akip) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. *JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(6), 529–558.

Yazid, I. D., & Karmila, A. P. (2024). Menuju Pemerintahan Digital Unggul: Tantangan dan Transformasi Indeks *E-government* di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(13), 387–396.